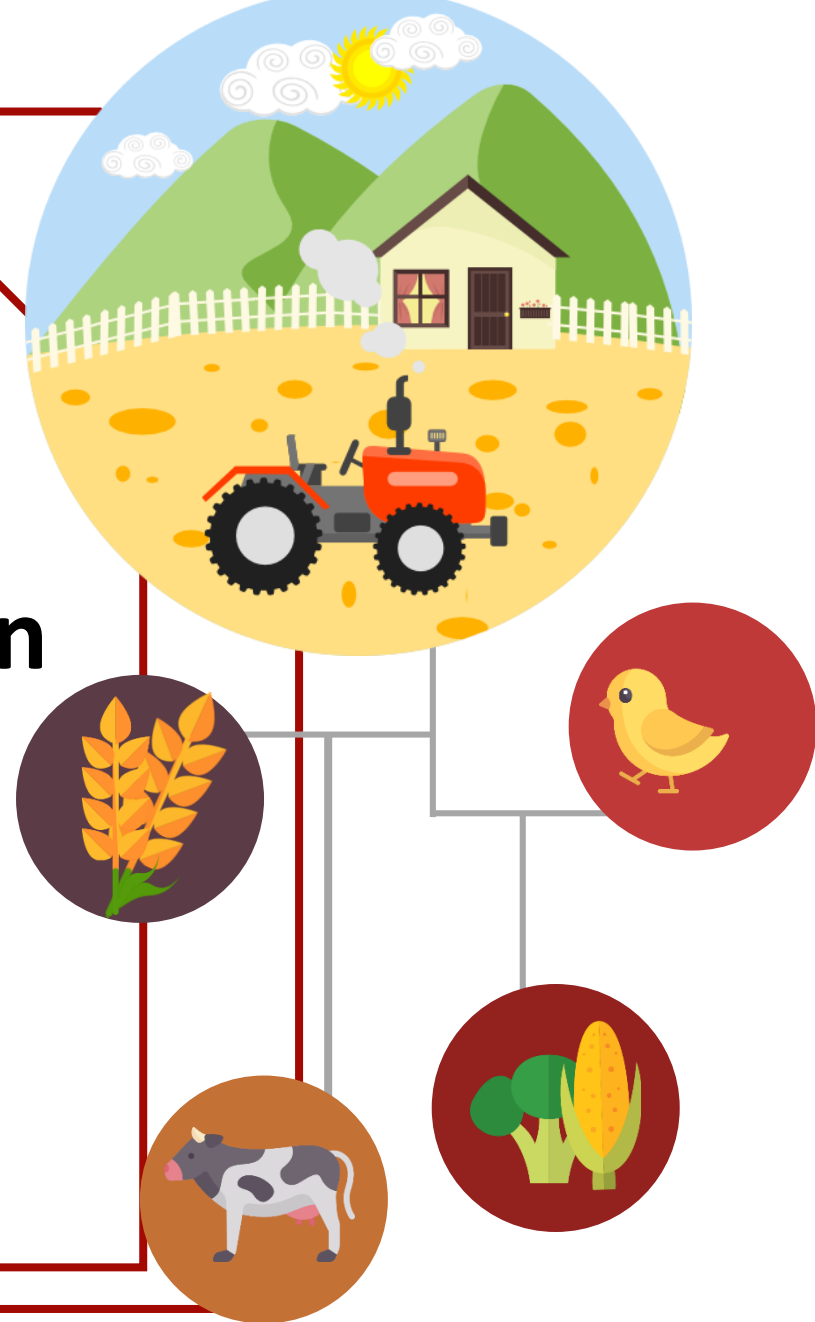


Akuntabilitas Anggaran dan Peningkatan Kualitas Kebijakan Dalam Pembangunan Sektor Pertanian

Wawan Wardiana, Direktur Litbang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta, 15 Januari 2018



URGENSI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Penyediaan Pangan -----> 1) Kebutuhan Dasar Manusia

“World peace **will not– and cannot–**
be built on empty stomachs”

Dr. Norman Borlaug (Nobel Peace Prize Winner in 1970)

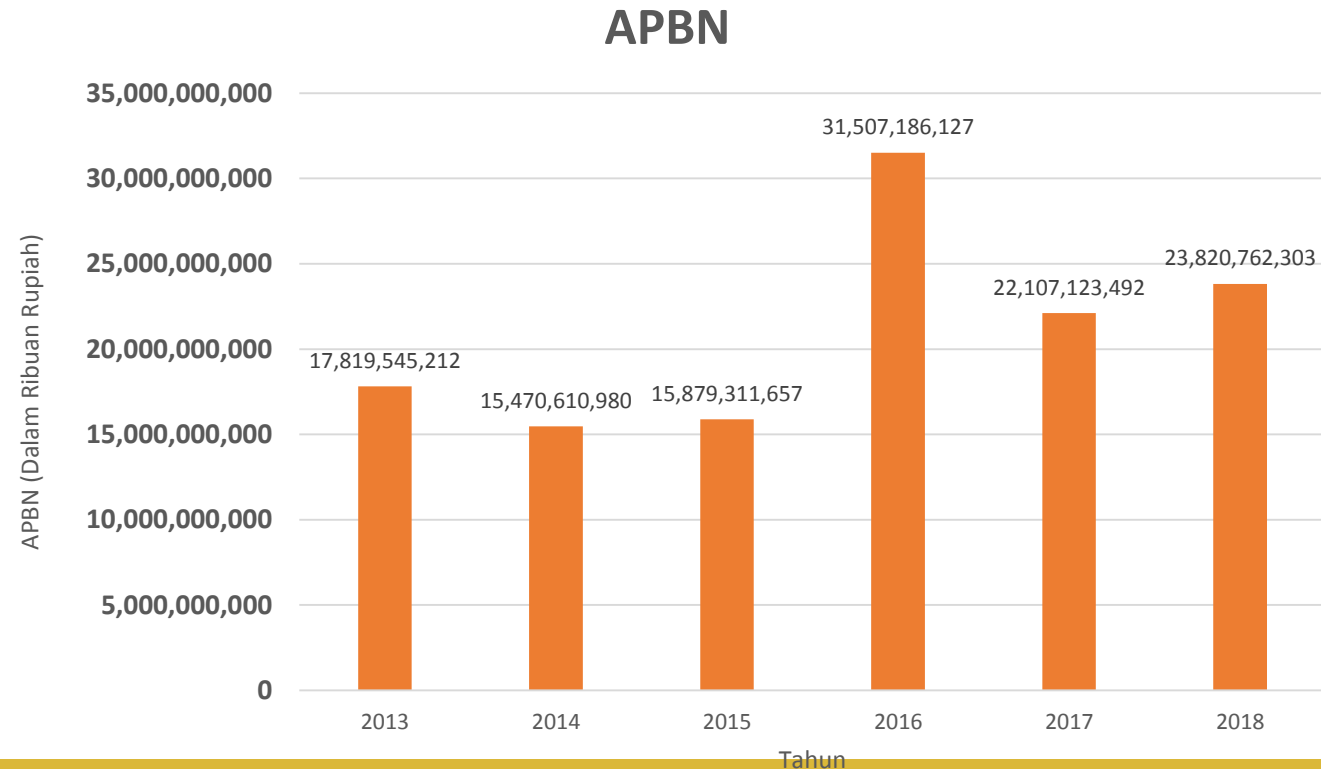
2) Kedaulatan Negara dan Ketahanan Nasional

“It’s important for our nation to build - to grow foodstuffs, to feed our people. Can you imagine a country that was unable to grow enough food to feed the people? It would be a nation subject to international pressure. It would be a nation at risk. And so when we’re talking about American agriculture, we’re really talking about a national security issue”



Memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan melalui pembangunan sektor pertanian yang produktif, dan berkualitas

Memiliki sumberdaya anggaran dengan jumlah yang relatif besar



RP

Tantangan →

Membangun pertanian yang produktif berkualitas dan menyejahterakan petani

Kekiniian yang ada, pembangunan sektor pertanian belum sepenuhnya berjalan optimal.

Di level internal organisasi, silo-silo unit masih muncul

Instrumen subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran

Petani juga belum secara langsung menikmati keuntungan atas melonjaknya harga sebuah komoditas

Akses pangan acap terbatas, dalam kondisi tertentu masyarakat harus mengeluarkan sumberdaya yang tinggi untuk mengaksesnya



Dalam merespon kondisi tersebut, setidaknya perlu dilakukan dua hal berikut:

1 Meningkatkan Governance Pengolaan Anggaran

Perhatian atas aspek akuntabilitas menempati prioritas tersendiri. Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, beserta institusi terkait lainnya, wajib memastikan adanya target kinerja yang terukur serta selaras menuju pencapaian visi organisasi.

2 Meningkatkan Kualitas Kebijakan

Guna menjaga dan memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan riil sejumlah hal perlu ditingkatkan meliputi

- a. Meningkatkan validitas data dalam mendukung pengambilan keputusan
- b. Meningkatkan manajemen kontrol pelaksanaan kegiatan
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelibatan pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

KEGIATAN PENCEGAHAN KPK DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Kajian Pengelolaan Pupuk Bersubsidi	1	6	Kajian Tata Niaga Importasi Gula Rafinasi
Komoditas Tata Niaga Komoditas Daging/Sapi	2	7	Kajian Tata Niaga Beras
Kajian Pengelolaan Raskin	3	8	Kajian Importasi Jagung Pakan
Kajian Alih Fungsi Lahan – LP2B	4	9	Kajian Subsidi Pertanian Pupuk, Benih, KUR, dan Asuransi Usaha Tani Padi
Kajian Tata Niaga Importasi Komoditas Pangan Strategis	5	10	Kajian Tatakelola Komoditas Pangan Strategis Jagung, Kedelai, Gandum, Bawang Putih, dan Ayam Ras

TERIMA KASIH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



15 Januari 2018

